

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberean Boedel Pailit*, PT Alumni, Bandung, 2014.
- Emmy Yuhassarie, (Ed.) *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum (20-22 Juli 2004)*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005
- H.Zaeni syhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Imran Nating, *Peranan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pembersan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2004.
- Pembersan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit (edisi revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, PT Alumni, Bandung.
- M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, 2008, Jakarta.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Citra Bhakti, Bandung, 1999.
- , *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- M.Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum-Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

RahayuHartini, *Hukum Kepailitan*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.

Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006.

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, 2008.

Sudaryat, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Jendela Mas Pustaka-Anggota IKAPI, Bandung, 2008.

Sutan Remy Sjahdeny, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

Syamsudin M.Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012.

Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, FH UII Press, 2016

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta.2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Berkas Terkait

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Perkara No : 01 / Pailit / 2011 / PN.Niaga.Smg tertanggal 26 April 2011.

Penetapan Pengadilan Niaga Semarang oleh Hakim Pengawas Nomor: 01/Pailit/2011/P.Niaga.Smg Tentang Penunjukan Kurator tertanggal 16 Juli 2014.

Akta Notaris Crist Arya Minarka SH, Nomor 8 tertanggal 5 November 1997.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/362/PB/XI/2007 tertanggal 6 November 2007.

Surat Nomor: 01. I./TK.TR/WAT.JI /IV /2011, perihal pemberitahuan pailit dan penyerahan dokumen, tertanggal 29 April 2011.

Surat Nomor: 02.II/TK.TR/WAT.JI/V/2011, perihal undangan rapat kreditor pertama, tertanggal 4 Mei 2011.

Surat Nomor: 04.V/WAT-01 / Smg/2011, Perihal Undangan Rapat Pra-Verifikasi dan Verifikasi PT Jati Indah (dalam pailit), tertanggal 16 Mei 2011.

Surat Nomor: 03.01/JI/SK-WAT/VIII/2012 Perihal Pemberitahuan dan Undangan Pelaksanaan Lelang Aset PT Jati Indah (dalam pailit) tertanggal 3 Agustus 2012.

Surat Nomor: 03.01/WAT.01/III/2012 Perihal Tindak Lanjut Surat Penawaran Atas Pembelian Aset PT Jati Indah (dalam pailit) tertanggal 3 Oktober 2012.

Surat Nomor: 26.02/JI/SK.WAT/XI/2013, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pembayaran Tahap Pertama Kepada Para Kreditor PT Jati Indah (dalam pailit).

Pengumuman daftar pembagian kepada para kreditor dari sisa hasil penjualan aset PT Jati Indah (dalam Pailit) tertanggal 10 Oktober 2013.

Surat Nomor: 002/ADM/JI/X/2015, Hal Permohonan Penjelasan Tentang Pembagian Hasil Penjualan Aset PT. Jati Indah, tertanggal 01 Oktober 2015

Surat Nomor: W.12.UI/3349/Um/9/2015, Perihal Permohonan Penjelasan Tentang Pembagian Hasil Penjualan Aset PT. Jati Indah (dalam pailit).

Surat Nomor: 03/BRE-JI/X/2015, Perihal Perkembangan Realisasi Pembagian Hasil Penjualan Aset PT. Jati Indah (dalam pailit) yang dilakukan oleh eks team kurator PT. Jati Indah (dalam pailit), Tertanggal 28 Oktober 2015.

Surat Direktorat Pajak Kantor Wilayah DPJ Jawa Tengah II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo, Nomor S-339 / WPJ.32 / KP.12 / 2017 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.

Surat Perihal Penjelasan tentang kreditor PT Jati Indah (dalam pailit) dan Petunjuk Menghadapi kreditor PT Jati Indah tertanggal 6 Februari 2017, dengan Surat Pengantar Panitera Nomor W. 12. UI. 542 / Pdt. 04. 01 / II /2017.

Surat Nomor: 01/Not.B/III/2017 Perihal Permohonan Penjelasan Pajak Penjualan dan Pajak Pembelian Atas SHM 360 & 288, Tertanggal 03 Maret 2017.

Surat Nomor: 04/BRE-JI/II/2017, Perihal Jawaban Hal Permohonan Penjelasan Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Lama, Tertanggal 28 Februari 2017.

Surat Perihal Pengaduan Tentang Kurator Lama, Sdr. Tutut Rokhayatun, SH.MH, dan Ria Aryani Nasution, SH.MH. Tertanggal 7 Maret 2017.

C. Bahan Hukum Elektronik

Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia Slide PPT, dalam:http://www.akpi.or.id/uploads/8/6/7/9/8679393/kode_etik_profesi_asosiasi.pptx&sa=AFQjCNHLu1s003t36hvU1UxLwY_3g3-ECg diakses tanggal 10 Maret 2017 pukul 20.00 WIB.

Prosedur Kepailitan Perbankan dan Industri Keuangan dalam <Http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dfe654d9902/hubungan-ojk-terhadap-prosedur-kepailitan-perbankan-dan-industri-keuangan> diakses 21 Maret 2017 pukul 21.19 WIB